

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah proses berkelanjutan yang melibatkan pembelajaran dengan lingkungan sekitar. Pendidikan dapat diberikan melalui jalur formal, nonformal, dan informal, yang dapat saling melengkapi dan memperkaya, sesuai dengan Pasal 13 (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Pendidikan akan diberikan melalui sistem terbuka, dengan memanfaatkan komunikasi tatap muka dan/atau jarak jauh.

Konsep belajar sepanjang hayat harus menghilangkan batasan ruang dan waktu dan meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Sejalan dengan visi dan misi pendidikannya, Pemerintah Indonesia memprioritaskan pendidikan berkelanjutan di sektor kejuruan sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan pendidikan, meningkatkan sumber daya manusia, dan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang didefinisikan oleh John M. Echols dan Hasan Sadily (1983, hlm. 144), 'pendidikan berkelanjutan' mengacu pada pendidikan yang berlangsung secara terus menerus, tanpa henti. Pembelajaran berkelanjutan tidak berakhir, tetapi berevolusi dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan tuntutan perubahan dan perkembangan, sehingga memungkinkan individu untuk memperoleh keterampilan sepanjang hayat (Anwar, 2006, hlm. 31). Bagian penting dari perolehan keterampilan di masyarakat adalah keterampilan kejuruan yang terkait dengan pekerjaan tertentu.

Kesadaran akan karier ditanamkan pada tahap awal pendidikan. Di tingkat sekolah menengah, bimbingan dan eksplorasi karier telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada tingkat selanjutnya, baik staf pendidikan formal maupun non-formal harus memberikan arahan yang jelas kepada siswa, memfasilitasi pergerakan menuju spesialisasi dan pada akhirnya pengembangan karir lanjutan. Institusi pendidikan juga dapat menawarkan kesempatan *inservice* dan pelatihan ulang karir pada tahap ini, seperti yang dicontohkan oleh sistem pengembangan karir yang dipromosikan di Indonesia. Pendidikan untuk dunia kerja (pendidikan

kejuruan) telah menjadi konsep yang mapan.

Buruh/karyawan/pegawai masih merupakan mayoritas tenaga kerja di Indonesia, yaitu sebesar 36,37 persen, berdasarkan status pekerjaan utama pada Agustus 2020. Dibandingkan dengan Agustus 2019, populasi penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai/karyawan/pegawai mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu sekitar 4,28 poin persentase. Status pekerjaan yang menunjukkan peningkatan paling besar adalah pekerja keluarga/tak dibayar, yang meningkat sebesar 2,80 poin. Penggunaan pekerja sementara juga meningkat, meskipun pada tingkat yang lebih rendah, sebesar 0,92 poin.

Dilihat dari status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja dapat diklasifikasikan ke dalam kegiatan formal dan informal. Individu yang terlibat dalam kegiatan formal adalah mereka yang bekerja dengan dukungan pekerja tetap dan karyawan, sementara yang lain diklasifikasikan sebagai terlibat dalam kegiatan informal (wiraswasta, bisnis yang dibantu oleh pekerja sementara atau pekerja tidak dibayar, pekerja lepas, dan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar).

Statistik menunjukkan bahwa tantangan yang signifikan dalam dunia pendidikan adalah tingginya angka pengangguran yang berasal dari ketidaksesuaian antara lulusan dengan lapangan kerja formal yang terbatas. Masalah ini diperkuat oleh angkatan kerja yang terus bertambah, sementara lapangan kerja formal tidak dapat memberikan kesempatan yang cukup. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, sebanyak 77,68 juta orang (60,47 persen) bekerja di sektor informal, sementara hanya 50,77 juta orang (39,53 persen) yang bekerja di sektor formal. Dibandingkan dengan data Agustus 2019, terdapat peningkatan 4,59 poin persentase dalam pekerjaan sektor informal (BPS: 2020).

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Barat lebih banyak terjadi di daerah perkotaan sebesar 11,07% dan 8,47% di daerah pedesaan. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, TPT di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 2,98%. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara mengejutkan mencatatkan TPT tertinggi dengan persentase 18,75%. Rinciannya adalah sebagai berikut: SD ke bawah (5,68%), Sekolah Menengah Pertama (SMP)

(10,70%), Sekolah Menengah Atas (SMA) (13,73%), Diploma I/II/III (9,85%), dan Perguruan Tinggi (10,19%). Tingkat pendidikan SMK mencatatkan TPT tertinggi sebesar 18,75%, sedangkan penduduk dengan pendidikan SD ke bawah memiliki TPT terendah sebesar 5,68%. Menurut daerah, TPT menurut kabupaten/kota pada Agustus 2020 tertinggi di Kabupaten Bogor sebesar 14,29% dan terendah di Kabupaten Pangandaran sebesar 5,08%.

Untuk mengatasi masalah tingginya angka pengangguran, pendidikan vokasi dapat menjadi solusi yang tepat. (Walter dalam penelitian Kuswana, 2013, hlm. 157) Pendidikan kejuruan adalah program pendidikan formal atau non-formal yang mempersiapkan individu untuk memasuki dunia kerja. Tujuan utama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah membekali lulusannya dengan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil di dunia kerja. Pendidikan kejuruan diklasifikasikan sebagai pendidikan menengah yang terutama mempersiapkan siswa untuk bekerja, terutama dalam bidang tertentu, menurut Pasal 15 (2) UUSPN 2003. Kurikulum sekolah kejuruan berbeda dengan sekolah menengah umum, dengan penekanan pada aspek praktik dan psikomotorik yang relevan dengan pekerjaan tertentu. Sekolah kejuruan menawarkan berbagai program yang memungkinkan siswa untuk memasuki pasar tenaga kerja pada tahap awal untuk memastikan bahwa lulusan mereka memiliki kualitas terbaik.

Namun, sekolah kejuruan menghadapi banyak kendala dan tantangan dalam memastikan kualitas lulusannya. Kesenjangan keterampilan antara lulusan VET dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja merupakan tantangan utama. Menurut Suryadi (2010, hlm. 5): "Pendidikan kejuruan berbasis sekolah telah menciptakan masalah struktural yang mengakibatkan kurangnya relevansi dengan dunia kerja. Perangkat pendidikan yang ditetapkan secara hukum membatasi kreativitas pengelola program dan menciptakan persepsi resistensi terhadap perubahan, sehingga menghambat pengembangan program studi yang berkelanjutan. Sebaliknya, dunia bisnis mudah beradaptasi dan terus berubah, sering mengadopsi teknologi baru berdasarkan permintaan pasar. Selain itu, ada ketidakseimbangan antara mereka yang mencari pekerjaan, terutama mereka yang berpendidikan di sekolah kejuruan. Pentingnya pendidikan masih belum jelas.

Secara khusus, pendidikan menengah dan kejuruan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

Penelitian menunjukkan bahwa kemitraan sekolah dengan pihak eksternal dapat bermanfaat. Sebagai contoh, Wayong (2010) menyoroti pentingnya Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di Sekolah Kejuruan untuk memenuhi tuntutan Dunia Kerja. Penelitian ini menyoroti peran penting kemitraan antara lembaga pendidikan dan bisnis/industri dalam menyukseskan PSG. Upaya kolaboratif dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pendidikan dapat meningkatkan relevansi kompetensi lulusan dengan tuntutan pasar kerja. Indikator relevansi mencakup waktu yang dihabiskan untuk menunggu pekerjaan, relevansi bidang keahlian seseorang dengan pekerjaan yang bersangkutan, dan integrasi ke dalam dunia kerja.

Sekolah harus mengambil langkah-langkah berikut untuk memastikan bahwa pendidikan sistem ganda (PSG) relevan dengan sekolah kejuruan dan kebutuhan dunia kerja: Untuk meningkatkan kompetensi dunia kerja siswa, langkah-langkah berikut dapat dilakukan: 1) Mengembangkan pemahaman tentang budaya kerja industri dan mengintegrasikannya ke dalam pola pembelajaran; 2) Memperkenalkan program keterampilan dunia kerja di sekolah; 3) Menyebarkan brosur untuk mempromosikan program-program ini; dan 4) Mengundang industri dan lembaga terkait untuk memberikan kuliah, sehingga menjembatani kesenjangan antara pelaksanaan magang dan perekrutan.

Sejalan dengan itu, Zavotka, Christine A., Teaford, Susan L., dan Margaret H. 2010. "Menerapkan Model Kemitraan Universitas-Masyarakat-Ritel untuk Memfasilitasi Pendidikan Masyarakat tentang Desain Universal." Makalah ini menyajikan sebuah model kemitraan kolaboratif yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program pendidikan masyarakat untuk desain yang lebih universal. Selain itu, tersedia juga panduan untuk tata bahasa, ejaan, dan penggunaan kosakata yang benar. Model ini terdiri dari lima tahap. Para penulis mempertahankan bahasa yang jelas, ringkas, dan logis dengan tetap mengikuti standar bahasa formal. Model kemitraan melibatkan lima tahap, yaitu: mengidentifikasi kekuatan dan mitra pembelajaran bersama,

mengembangkan program, menerapkan desain program universal, memfasilitasi penjangkauan masyarakat, dan beralih ke penjangkauan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan menyebarluaskan program pendidikan yang mempromosikan pendidikan sekolah di kalangan konsumen. Untuk mencapai hal ini, penting untuk menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan obyektif, menghindari bahasa yang bias atau hias, dan mempertahankan register formal. Selain itu, teks harus mengikuti struktur konvensional, menggunakan pilihan kata yang tepat dan bebas dari kesalahan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca.

Berkaitan dengan hal tersebut, Okpor, Ikechukwu, dan Najimu (2012) mengkaji secara mendalam tentang "Kemitraan Pemerintah-Swasta untuk Pencapaian Keterampilan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan Teknis di Nigeria". Studi ini membahas kerja sama antara sekolah swasta dan pendidikan kejuruan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja yang kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar kerja. Tujuan utama dari kemitraan ini adalah untuk menyediakan tenaga kerja yang terampil dan terlatih agar sesuai dengan permintaan pasar kerja. Kemitraan ini dianggap sebagai teknik yang efisien untuk memajukan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan kejuruan. Membangun hubungan yang kuat antara sektor pendidikan swasta dan sektor publik dapat membawa kesuksesan, seperti yang ditunjukkan oleh kemajuan yang dicapai dalam pendidikan kejuruan teknik di Nigeria. Dengan demikian, kemitraan sektor swasta merupakan mekanisme penting untuk mencapai pembangunan nasional di sektor pendidikan, khususnya dalam pengembangan dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan kerja.

Sementara itu, dalam artikel mereka pada tahun 2013 yang berjudul "Private-Public Partnerships and Technical Vocational Education and Training (TVET) in Developing Economies", Okoye, K.R.E., dan Chijioke, Okwelle P. memberikan penjelasan yang obyektif mengenai pendidikan kejuruan sebagai sebuah sistem pendidikan yang bertujuan menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan mampu berkompetisi di tengah lingkungan perekonomian yang terus berubah. Pendidikan kejuruan diakui atas kemahirannya dalam menghasilkan pekerja terampil yang dilengkapi dengan pengetahuan dan bakat yang diperlukan untuk berkembang

dalam karier mereka. Hal ini menekankan pentingnya ekonomi yang tidak hanya bergantung pada penduduk yang berpendidikan formal, tetapi juga pada pekerja terampil yang dapat segera menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Untuk mencapai hal ini, diperlukan kemitraan dengan sektor swasta, yang dianggap sebagai langkah penting untuk mencapai tujuan ini. Sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan untuk kemitraan antara pendidikan kejuruan dan sektor swasta sebagai strategi penting untuk mengelola dan merevitalisasi sektor ini di negara ini. Dukungan keuangan ini dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam menciptakan kemitraan pendidikan kejuruan yang pada akhirnya dapat membawa perubahan positif. Pendidikan kejuruan yang memadai dapat menghasilkan tenaga terampil yang memiliki pengetahuan teknis dan sikap yang tepat yang diperlukan untuk berhasil dalam karir profesional mereka.

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menciptakan program yang efektif, lembaga pendidikan harus berusaha untuk mengembangkan strategi yang sistematis, konkret, dan terukur. Disertasi ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja pendidikan yang komprehensif yang memastikan bahwa lulusan memenuhi kualifikasi yang diperlukan yang dibutuhkan oleh sektor bisnis dan industri. Sekait dengan itu, Kuswana (2013, hlm. 34) menekankan pentingnya kemampuan kolaborasi dan komunikasi yang efektif, karena hal ini merupakan persyaratan mendasar di tempat kerja. Oleh karena itu, sekolah menengah kejuruan harus memprioritaskan pengembangan keterampilan kolaborasi dan komunikasi dengan lembaga mitra di sektor bisnis dan industri.

Untuk membangun sistem seperti itu, perlu dikembangkan kerja sama dan kemitraan. Sekolah menengah kejuruan dapat mengidentifikasi kebutuhan dunia kerja sejak dini dengan membangun kemitraan yang erat dengan institusi terkait, yang mengarah pada proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri. Komunikasi antara sektor pendidikan dan industri sangat penting dalam mengembangkan konsep pendidikan yang sesuai dengan kondisi industri dan kebutuhan kompetensi. Tujuannya adalah untuk memodifikasi program pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar dapat membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam persaingan dunia kerja.

Selain itu, bentuk kolaborasi lain yang diupayakan oleh SMK adalah pelaksanaan praktik kerja industri (prakerin) bagi para siswa yang ingin mendapatkan penempatan kerja di dunia usaha dan industri. Pendekatan ini memfasilitasi komunitas bisnis dalam mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi spesifikasi dan prasyarat yang ditargetkan.

Kolaborasi sangat penting dalam mencapai hasil pendidikan yang positif di sekolah. Kolaborasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan kolaborasi bervariasi berdasarkan kondisi dan kebutuhan sekolah dan mitra yang terlibat. Prinsip-prinsip utama untuk kemitraan yang efektif termasuk saling menguntungkan, kepercayaan, dan hubungan saling memberi dan menerima antara para pihak. Kolaborasi antara pendidikan kejuruan dan sektor industri menawarkan beberapa keuntungan, termasuk pengembangan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya dapat mencakup fasilitas, kegiatan pelatihan, pendampingan, dan konsultasi. Peran sekolah kejuruan adalah mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja dan menumbuhkan sikap profesional di bidang tertentu. Oleh karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha dan industri sangatlah penting.

Kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan dan memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Sekolah kejuruan dapat menjalin kesepakatan dengan dunia usaha untuk menyerap sumber daya mereka agar bermanfaat bagi semua. Kemitraan ini menumbuhkan situasi yang saling menguntungkan bagi dunia usaha, sekolah, dan siswa. Kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri melalui kemitraan menawarkan peluang utama untuk mengembangkan proses yang mengurangi ketidaksesuaian antara profil lulusan, kurikulum sekolah, dan kebutuhan tenaga kerja di pasar kerja.

Mengoptimalkan dan memanfaatkan semua potensi dan sumber daya di lingkungan sekolah akan memperkuat kolaborasi yang efektif. Sekolah dapat menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk menyerap lulusan SMK. Kemitraan seperti ini menguntungkan semua pihak yang terlibat, baik dunia usaha dan industri, sekolah, maupun siswa. Dengan membentuk kemitraan tersebut,

masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk menciptakan proses yang dapat mengurangi kesenjangan antara profil lulusan, kurikulum sekolah, dan kualifikasi yang dibutuhkan di dunia kerja.

Pada dasarnya, kemitraan mengacu pada kerja sama yang saling menguntungkan atau kolaborasi di antara berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok. Kemitraan melibatkan kolaborasi relasional di mana setiap pihak yang bermitra menyumbangkan keahlian unik untuk bekerja sama dalam sebuah kelompok atau tim. Menurut *The American Heritage Dictionary* dalam Rukmana (2006, hlm. 59), kemitraan didefinisikan sebagai hubungan kerja sama antar entitas untuk mencapai tujuan bersama. "Hubungan antara individu atau kelompok yang ditandai dengan kerja sama dan tanggung jawab bersama, dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu."

Dalam konteks ini, kemitraan memiliki banyak arti, seperti yang diuraikan oleh Rukmana (2006, hlm. 60). Di antaranya adalah kerja sama, yang merujuk pada sejauh mana upaya satu pihak untuk memenuhi keinginan pihak lain, dan ketegasan, yang menunjukkan sejauh mana upaya satu pihak untuk memenuhi keinginannya sendiri. Proses kolaborasi dapat dikategorikan ke dalam empat jenis: kompetisi, kerja sama, kolaborasi, dan kompromi. Kompetisi melibatkan masing-masing pihak yang hanya berfokus pada pemenuhan keinginan mereka sendiri. Kerja sama melibatkan masing-masing pihak yang berusaha mencapai keinginan mereka sendiri. Kolaborasi melibatkan setiap pihak yang berusaha memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat. Kompromi melibatkan masing-masing pihak yang bersedia berkorban untuk memastikan pembagian beban dan manfaat yang adil.

Kegiatan kemitraan dapat dikembangkan untuk menjalin kerjasama antara dunia usaha dan dunia industri dengan SMK. Kegiatan tersebut meliputi pengelolaan program bersama antara penyelenggara pendidikan dengan institusi pasangan, pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh institusi pasangan, pendanaan program yang diperlukan untuk melaksanakan kemitraan, dan penempatan lulusan dari institusi pendidikan pada sektor atau komoditas tenaga kerja yang dibutuhkan oleh institusi pasangan. Mulyasa (2012, hlm. 148) menyatakan bahwa ada dua dimensi dalam membangun hubungan dan kolaborasi

antara sekolah dan masyarakat. Dimensi pertama berkaitan dengan kepentingan sekolah, yang meliputi menjaga kelangsungan kehidupan sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan, menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar, dan menerima dukungan dan bantuan masyarakat dalam mengembangkan program sekolah. Kedua, masyarakat harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat kemajuan sekolah, memastikan relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat, dan memungkinkan anggota masyarakat memperoleh keterampilan baru dan meningkatkan kemampuan mereka.

Sekolah adalah anggota masyarakat yang penting. Peran sekolah adalah menyediakan pendidikan dan memiliki kapasitas untuk membentuk kolaborasi atau aliansi dengan lembaga lain di masyarakat. Kuncoro (2010, hlm. 4) menyatakan bahwa kolaborasi sekolah dengan lembaga lain di masyarakat bertujuan untuk: a) mendukung sekolah dalam menjalankan fungsi pendidikannya; b) meningkatkan pengalaman belajar siswa dalam lingkungan yang beragam; c) membuat kegiatan belajar siswa relevan dengan situasi kehidupan nyata; d) membantu sekolah menggunakan sumber daya masyarakat untuk tujuan pendidikan; e) mendorong kemandirian, kreativitas, toleransi, dan keterbukaan siswa dalam proses belajar; dan f) meningkatkan relevansi kegiatan belajar siswa dengan mengatasi masalah masyarakat dan mendorong perubahan.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai, dan untuk menyesuaikan program pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, kerja sama dengan pihak eksternal, terutama sektor bisnis dan industri, diperlukan. Salah satu metode kerja sama adalah sistem pendidikan ganda, yang dikembangkan untuk meningkatkan relevansi sekolah kejuruan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pemerintah telah meluncurkan kebijakan link and match untuk memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dengan sektor korporasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil dan cakap yang memenuhi kebutuhan sektor pembangunan dalam hal kuantitas, kualitas, dan alokasi (Mulyasa: 2012, hlm. 10). Kemitraan antara sekolah dapat dibangun dengan lembaga pemerintah dan swasta, seperti universitas, sekolah

sejenis, sektor bisnis dan industri, dan masyarakat setempat.

Untuk memastikan keberhasilan kemitraan, sangat penting untuk memiliki visi dan misi yang sama dengan tetap menjaga kepercayaan, kejujuran, saling menguntungkan, dan saling menghormati di antara semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi atau kemitraan. Komunikasi yang efektif dan dedikasi juga sangat penting dalam mencapai tujuan dengan efisiensi dan produktivitas yang maksimal. Oleh karena itu, dalam mencari mitra potensial untuk berkolaborasi, sangat penting untuk menetapkan kriteria yang selaras dengan tujuan dan sasaran kemitraan. Selain itu, memahami kondisi pasar dari pesaing, klien, dan pemasok juga sangat penting (Rukmana, 2006, hlm. 63). Dalam menetapkan parameter-parameter ini, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut: kekhususan, keterukuran, dapat dicapai, realistis, dan ketepatan waktu.

Parameter yang terukur diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas pengembangan kemitraan. Sufyarma, sebagaimana dikutip oleh Rukmana (2006, hlm. 21), menekankan bahwa indikator keberhasilan pendidikan membutuhkan proses yang berkualitas tinggi untuk mencapai tujuan yang meliputi: a) program pembelajaran yang dirancang dengan baik, b) kurikulum yang selaras dengan dunia kerja, c) akses terhadap tenaga kependidikan yang memadai, d) peralatan pendidikan yang efektif dan tersedia, e) dana yang cukup untuk pembelajaran, dan f) manajemen organisasi yang efisien.

Kecakapan sekolah dalam membangun kemitraan dengan sektor bisnis dan industri dapat diukur melalui beberapa indikator, yang meliputi: a) pembentukan tim hubungan masyarakat yang memiliki keahlian dalam menjalin aliansi dengan sektor-sektor tersebut di atas, b) melakukan penilaian kolaboratif dengan mitra yang relevan sebelum pelaksanaan program, c) melaksanakan perjanjian kerja sama sesuai dengan nota kesepahaman dengan mitra yang sudah ada, dan d) melakukan berbagai kegiatan, seperti pertukaran kolaboratif siswa, guru, kepala sekolah, dan magang, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi dalam program tersebut (Kementerian Pendidikan Nasional, 2009, hlm. 64).

Oleh karena itu, efisiensi membangun kolaborasi pendidikan dapat disimpulkan dari pencapaian tolok ukur yang dinyatakan dalam kebijakan kerja

sama. Oleh karena itu, efisiensi membangun kolaborasi pendidikan dapat disimpulkan dari pencapaian tolok ukur yang dinyatakan dalam kebijakan kerja sama. Tolok ukur tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kinerja siswa, keselarasan kurikulum dengan dunia kerja dan tingkat keterserapan lulusan.

Sekolah yang bermitra dengan DUDI diwajibkan untuk mengembangkan hubungan dengan mitra usaha dan melakukan asesmen terhadap permasalahan, kebutuhan dan potensi pertumbuhan usaha mikro dengan menggunakan model kemitraan yang berbasis andragogi. Kemitraan, menurut Pasal 1 butir 13 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, adalah kerja sama antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar, baik langsung maupun tidak langsung. Kerja sama ini didasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, dan saling menguntungkan, serta bertujuan untuk memperkuat semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, tujuan dari model ini adalah untuk membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan keuangan keluarga, serta mengembangkan keterampilan kewirausahaan mereka, dengan menyediakan berbagai strategi.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki peran strategis dalam mendidik siswa, khususnya dalam pendidikan kewirausahaan, untuk membekali mereka dengan pengetahuan tentang kewirausahaan yang akan memungkinkan mereka untuk mengejar kemandirian dan membangun bisnis mereka sendiri. Sekolah menengah kejuruan menawarkan pelatihan kewirausahaan kepada siswa mereka melalui program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan afektif, kognitif, dan psikomotorik siswa yang sejalan dengan pendekatan keterampilan kewirausahaan.

Sependapat dengan hal di atas, Oystein dan Rennemo (2019) menemukan bahwa rasa saling percaya dipupuk melalui dialog dan pertukaran pengalaman baik dalam situasi kelas formal maupun non-formal selama program-program ini. Selain itu, pelatih atau guru yang memiliki pengalaman praktis dapat memungkinkan usaha bisnis yang nyata dan bukan hanya teori (Rennemo & Åsvoll, 2019). Hal yang juga tidak kalah penting untuk memasuki dunia kerja adalah memiliki

ketajaman bisnis. Pada kenyataannya, lulusan sekolah kejuruan menunjukkan minat yang minim terhadap kewirausahaan karena sifat praktik bisnis yang menantang. Ketakutan akan kegagalan dan kerugian yang tinggi sering kali mengganggu individu ketika memulai usaha bisnis. Para siswa perlu mengembangkan keberanian dan kreativitas mereka untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Pusat Bisnis menyediakan platform untuk bisnis perdagangan dengan fokus pendidikan yang selaras dengan kompetensi keterampilan yang relevan. Hal ini dapat diimplementasikan sebagai sistem gabungan dengan keterampilan lainnya. Pusat Bisnis berfungsi sebagai pusat pelatihan dan pendidikan siswa, yang beroperasi sebagai unit produksi untuk sekolah dan laboratorium kewirausahaan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam penjualan, perhitungan, dan pembukuan.

Menurut pengamatan yang dilakukan pada tanggal 26 April 2021 di SMKN 8 Kota Bekasi, hanya ada sedikit guru dan manajer Business Centre yang memiliki pengalaman dari dunia bisnis. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk melibatkan siswa secara efektif dalam kegiatan kemitraan. Kurikulum sekolah seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Hal ini menyebabkan siswa tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri. Kurikulum sekolah fokus pada teori, sedangkan Dunia Usaha dan Dunia Industri membutuhkan keterampilan praktik. Siswa seringkali tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri sehingga siswa kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Siswa tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik, atau tidak memiliki pengalaman kerja. Kurangnya komunikasi antara sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, ini menyebabkan sekolah tidak mengetahui kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri, dan Dunia Usaha dan Dunia Industri tidak mengetahui program yang ditawarkan oleh sekolah. Dalam hal ini peneliti berusaha memberikan masukan serta solusi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Fokus yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengeksplorasi dan merumuskan sebuah model konseptual mengenai kemitraan sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan harapan bisa meningkatkan keterampilan siswa dalam berwirausaha.

Kegiatan kemitraan ini bagian dari kegiatan pendidikan masyarakat, dimana sekolah memberikan ruang kepada lembaga non formal untuk mengisi tenaga-tenaga pendukung sesuai dengan kompetensinya pada perusahaan dengan memasukan siswanya dalam program magang atau prakerin. Kegiatan ini diharapkan bisa mengubah pola pikir siswa dalam mempersiapkan masa depannya sesuai dengan slogan SMK, bekerja, melanjutkan dan berwirausaha.

Peneliti mengevaluasi penelitian sebelumnya tentang masalah kemitraan untuk mendapatkan wawasan tentang hasilnya. Ketidaksesuaian antara kenyataan dan harapan masyarakat merupakan tema utama dalam penelitian ini. Hal ini memerlukan pemeriksaan awal terhadap masalah pekerjaan dan pengangguran. Sebuah benang merah diidentifikasi dalam kesulitan yang muncul dari penyelidikan teoritis ini, terutama mengenai asal-usul pengangguran dan solusi yang diperlukan.

Kegiatan kemitraan berbasis andragogi ini merupakan instrumen kegiatan yang komprehensif karena berorientasi pada perilaku dan *sharing experinece* dalam meningkatkan pengelolaan dan ketarampilan berwirausaha khususnya pada siswa yang telah melaksanakan magang atau prakerin. Hal ini memiliki makna bahwa permasalahan utama yang terjadi dalam kemitraan adalah perlu adanya model yang mendukung pelaksanaan kemitraan sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam meningkatkan keterampilan berwirausaha.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

Berpijak pada pemaparan di atas maka masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah penerapan model kemitraan sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) berbasis andragogik. Hal ini juga antara pihak dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu :

- 1) Para lulusan SMK sebagian besar belum mendapatkan pekerjaan dan belum mampu berwirausaha;
- 2) Kemitraan sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) masih belum maksimal dalam prosesnya.
- 3) Model kemitraan yang dijalankan sekolah belum berbasis andragogi; serta

4) Keterampilan kewirausahaan belum meningkat, terutama di kalangan siswa kelas XII. Berbagai faktor mempengaruhi masalah yang dibahas.

Pertama, pendidik kewirausahaan kurang memahami kondisi ekonomi di masyarakat. Kedua, kondisi siswa yang semakin kompleks, ditambah dengan kebutuhan penilaian yang beragam, mengharuskan para pendidik untuk terus memperbarui kompetensi mereka dalam memasukkan pembelajaran kewirausahaan ke dalam pengajaran mereka. Selain itu, kurangnya pelatihan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, universitas, asosiasi profesi atau inisiatif masyarakat yang secara menyeluruh mengeksplorasi model kemitraan berbasis andragogi antara sekolah dengan bisnis dan industri. Keempat, model kemitraan kerja dan kewirausahaan di dunia pendidikan saat ini belum memadai untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan guru dan siswa.

Identifikasi ini telah mengungkapkan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kurangnya kompetensi di antara para pendidik dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan di sekolah. Penelitian ini akan berfokus pada kemitraan yang kurang optimal dalam kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pendidik, siswa, dan lulusan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membangun model kolaborasi antara dua lembaga untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan melalui kegiatan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana model kemitraan sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) berbasis andragogi?” Melihat luasnya cakupan permasalahan, rumusan masalah tersebut dibatasi dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut ini.

1. Bagaimanakah kondisi objektif kemitraan sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi siswa yang terjadi pada saat ini di SMKN Kota Bekasi?
2. Bagaimanakah model kemitraan sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) berbasis andragogi?
3. Bagaimanakah validasi model kemitraan sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) berbasis andragogi?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan mengembangkan model kemitraan Sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) berbasis andragogi. Adapun penelitian ini secara khusus bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kondisi objektif kemitraan sekolah dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi siswa yang terjadi saat ini di SMKN Kota Bekasi;
2. Untuk mengembangkan model kemitraan sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) berbasis andragogi;
3. Untuk menganalisis hasil validasi model kemitraan sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) berbasis andragogi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat melengkapi teori tentang model kemitraan sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) berbasis andragogik pada lembaga SMK di Kota Bekasi serta memverifikasi model kemitraan yang telah ada saat ini dilapangan.

2. Manfaat praktis, yaitu

- a. Memberi masukan / gagasan tentang tentang penerapan model kemitraan sekolah dengan DUDI berbasis andragogi pada smk di kota bekasi;
- b. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan berwirausaha (*skill entrepreneurship*) siswa yang sesuai dengan kondisi saat ini.

1.5 Struktur Organisasi Penelitian

Pada bagian ini, seluruh isi disertasi akan diungkap secara berurutan. Penulisan disertasi ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Wawan Hardiyanto, 2024

PENGEMBANGAN MODEL KEMITRAAN SEKOLAH DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI BERBASIS ANDRAGOGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 1) BAB I Pendahuluan, berisi: Latar Belakang Penelitian, Identifikasi dan Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Struktur Organisasi Penelitian
- 2) BAB II Tinjauan Pustaka, berisi: Tinjauan Teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian
- 3) BAB III Metode Penelitian, berisi: Lokasi dan Subjek Penelitian, Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian; Tahap-tahap Penelitian, Definisi Operasional, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Instrumen Penelitian.
- 4) BAB IV Hasil Penelitian, berisi: Hasil dan Pembahasan Penelitian sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti.
- 5) BAB V Penutup, berisi Simpulan dan Rekomendasi.